

MAKALAH STUDI PERBANDINGAN KURIKULUM



**STUDI
PERBANDINGAN
KURIKULUM
CINA, KOREA
& JEPANG**



Cepi Riyana
(NIM.0707267)

**PRODI S3 PENGEMBANGAN KURIKULUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2008**

STUDI PERBANDINGAN KURIKULUM: CINA, KOREA DAN JEPANG

A. Pendahuluan

Studi perbandingan pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan system pendidikan Negara tertentu, terutama yang berhubungan dengan kelebihan yang terjadi pada system pendidikan negara tersebut. Untuk itulah pada kesempatan kali ini penulis mencoba menguraikan perbandingan pendidikan terhadap Negara di kawasan Asia, khususnya yang meliputi Negara, RRC, Korea Selatan, dan Jepang.

Sistem manajemen dari ketiga Negara ini bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi, sifat kesentralistiknya hanya terbatas kepada penyusunan panduan dan pedoman semata, sedangkan operasionalnya secara penuh di serahkan kepada komite/Dewan sekolah secara mandiri untuk mengkaji proses pendidikan secara keseluruhan. Kondisi ini sangat berbeda dengan system pendidikan di Indonesia masa lalu dan masa kini yang mana masalah sepenuhnya sentralistik, tanpa memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan proses pendidikan, sedangkan saat ini di Indonesia memasuki era “desentralisasi” ini pun proses pengelolaan pendidikan, khususnya aspek anggaran “Daerah” masih belum manaruh perhatian penuh terhadap pendidikan.

Penulis tertarik untuk mengkaji ketiga Negara ini, dikarenakan ketiga Negara ini memiliki kemajuan yang begitu pesat dalam sector industri, khususnya industri otomotif dan elektronik. Kemajuan ini tidak terlepas dari kemajuan pendidikan di Negara ini masing-masing, terutama dalam penguasaan teknologi industri.

Makalah ini ditulis atas dasar kajian pustaka, dari berbagai sumber yang relevan, untuk itu mengingat keterbatasan penulis, makalah ini masih diperlukan sumbangan dan saran dari pembaca umumnya, serta dari dosen pembina mata pelajaran khususnya. Namun demikian penulis telah berusaha untuk menyajikan makalah ini semaksimal mungkin sehingga diharapkan akan dapat menambah bahan, dan kajian penulis tentang pemahaman system pendidikan ketiga Negara ini.

Makalah ini disajikan dalam beberapa Topik yaitu, Pendahuluan, Kajian Sistem pendidikan, Pembahasan serta Kesimpulan dan Rekomendasi, yang kesemuanya tersaji dalam kalimat yang singkat dan padat.

Negara Republik Rakyat Cina

Latar Belakang

Cina adalah Negara yang paling luas di dunia, dengan luas daerah sekitar 9,6 juta kilometer persegi. Dua pertiga dari daerah ini terdiri dari gurun pasir dan pegunungan. Penduduk Cina 1989 berjumlah \pm 540 juta jiwa, dan pada tahun 2000 berjumlah 1.246.871.951 jiwa, dengan komposisi 25,5% berusia di bawah 15 tahun dan 5% di atas 65 tahun.

Bahasa resmi adalah bahasa Mandarin, kemudian Negara ini bertetangga dengan Mongolia di utara, Rusia di bagian barat laut dan timur laut, dengan Afganistan, Pakistan, Tajikistan, Kazakhihistan di barat, dengan India, Nepal, Bhutan, Myanmar, dan Laos bagian Selatan. Cina pada umumnya adalah Negara agraris, dengan kondisi pekerja adalah 2,9% buruh industri, 17,9% sektor jasa, dan petani 60,3%, dan hampir tidak ada angka pengangguran

Tujuan Pendidikan Cina

Sejak tahun 1980-an pemerintah Cina menetapkan prinsip-prinsip dasar pembangunan ekonomi sebagai tugas sentral Negara dengan tetap berpegang pada empat landasan yaitu : Sosialisme, Komunisme, marxisme, Leninisme serta ideology MAO Tse Tung, dan terbuka terhadap dunia luar.

Pada tahun 1985 melalui keputusan komite petani Komunis Cina diadakan reformasi struktur pendidikan, dengan tegas menyatakan bahwa ***“Pendidikan harus menjalankan tujuan pembangunan sosialis, dan pembangunan sosialis harus tergantung pada pendidikan”***. Keputusan ini menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara pendidikan dan pembangunan ekonomi, serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ini tergantung pada kemajuan IPTEK serta peningkatan kualitas angkatan kerja. Dengan demikian tujuan umum pembangunan pendidikan Cina adalah untuk membangun kerangka dasar system pendidikan yang dapat dipakai dan disesuaikan dengan keperluan gerakan modernisasi sosialis yang diarahkan pada tuntutan abad ke-21, dan yang merefleksikan karakteristik dan nilai-nilai Cina.

Struktur dan Jenis Pendidikan

Adapun struktur system pendidikan Cina adalah meliputi : Pendidikan dasar (basic education), pendidikan teknik dan kejuruan (Technical and Vocational Education, TAPE), pendidikan tinggi (Higher education, HE), dan pendidikan orang dewasa (adult education, HA), berikut visualisasi system pendidikan Cina.

Basic Education mencakup TK, Sekolah dasar dan pendidikan menengah, dengan lama pendidikan yaitu : prasekolah 3 tahun ke atas, sekolah dasar 5-6 tahun dengan usia masuk SD 6 th, dan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat pertama 3 th, dan tingkat atas selama 3 tahun.

Pada tahun 1990 APN murid SD adalah 97,8%, sedangkan angka melanjutkan ke sekolah menengah pertama 77,8%, (38,69 juta) yang ditampung di 72000 SMP, dan 16000 SMA dengan siswa 7,17 juta orang, dan 1075 lembaga

Perguruan Tinggi, dengan mahasiswa 2, 15 juta mahasiswa. Selain pendidikan formal, di Cina juga berkembang pendidikan non formal yang berupa pendidikan orang dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan sosio-ekonomi penduduk. Selain itu di Cina dikembangkan pendidikan literasi guna pemberantasan buta huruf, hingga saat ini sudah tercatat 42,5 juta lebih Rakyat Cina yang telah dapat, “ melek aksara”. Pada tahun 1996 tercatat 82% tingkat literasi di Cina. (*The World Almanac and book of facts 2000*).

Manajemen pendidikan di Cina

Sistem pendidikan di Cina adalah desentralisasi, mulai dari level pusat, provinsi, kotamadya, kabupaten, termasuk daerah-daerah otonomi/ setingkat kotamadya. Adapun yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan adalah komite pendidikan Negara (*state education Commission, SEDC*), adalah suatu organisasi profesional pemerintah dalam bidang pembangunan pendidikan. Kemudian pada tahun 1985 pemerintah pusat mendelegasikan pendidikan dasar kepada kabupaten dan kota-kota kecil di daerah-daerah pedalaman.

Biaya Pendidikan. Alokasi biaya pendidikan tersedia pada pemerintah pusat dan daerah., dengan distribusi, alokasi dari daerah untuk pendidikan yang dikelola oleh daerah dan dana pusat untuk lembaga pendidikan yang berada di kementerian-kementerian. Besar anggaran pendidikan Cina pada tahun 1990 adalah sebesar 43,3 miliar RnB (Reuminbi) guan (13,1% dari anggaran Negara).

Personalia. Pada tahun 1990 Cina memiliki 13,45 juta guru, dengan perincian : 5,58 juta guru SD, 3,63 juta guru-guru sekolah menengah, dan 394.500 adalah guru di pendidikan tinggi reguler. Adapun standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan (inservice training) yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Negara.

Kurikulum. Kurikulum dirumuskan oleh komisi pendidikan Negara (SEDC), yang sangat fleksible serta berfariasi atas dasar kemampuan dan karakteristik wilayah, kota dan desa, dengan memberikan keleluasan bagi daerah/ pedesaan untuk menambahkan kurikulum local, dengan acuan sebagai berikut: SD memuat 10 mata pelajaran yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan, untuk SD pedesaan misal, memuat mata pelajaran pertanian selain mata pelajaran inti, moral, matematika dan bahasa Cina, sedangkan untuk SD perkotaan diwajibkan mata pelajaran olah raga; Sekolah menengah Pertama memberikan 13 mata pelajaran wajib, termasuk diantaranya MA. Pendidikan moral, politik, Bahasa Cina, Bahasa Asing dan matematika; sedangkan untuk SLTA disesuaikan dengan keinginan siswa, kenutuhan social masyarakat serta kondisi lembaga setempat, dengan beberapa mata kuliah pilihan.

Sistem Ujian dan Sertifikasi. Sekolah dasar dan menengah melaksanakan empat macam ujian, yaitu : ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah dan ujian masuk SMP, dan ujian-ujian ini terbatas pada mata pelajaran bahasa Cina dan Matematika. Sedangkan ujianmasuk SMA, digabungkan dengan ujian akhir SMP. Untuk masuk PT, dilakukan ujian seleksi Nasional dengan pemisahan antara pilihan science dan ilmu social.

Isu-isu Pendidikan Cina. Masalah pendidikan Cina tahun 2000 , meliputi kualitas pendidikan, profesionalisme personil pendidikan, isi dan metodologi pendidikan yang belum memenuhi tuntutan pembangunan social nasional.

Sistem Pendidikan Republik Korea Selatan

Latar Belakang

Republik Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1948 terletak disemenanjung di daratan Asia Timur, dengan batas-batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan lautan pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan selat Jepang, disebelah barat berbatasan dengan demarkasi militer (garis lintang 38^o) yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara.

Penduduk Kore Selatan kurang lebih 47 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata 1,7%/ tahun dengan kondisi penduduk yang homogen (etnik Korea), dengan angka literasi 98% (world almanac 2000).

Adapun system pemerintahan Korea Selatan bersifat sentralistik, dengan system sentralistik ini maka kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk di bidang pendidikan dapat dijalankan tanpa harus mendapat persetujuan badan legislative daerah, seperti yang terdapat pada pemerintahan system desentralisasi.

Tujuan Pendidikan Korea Selatan

Salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948 adalah menyusun undang-undang pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, maka tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa Identitas Nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan Nasional; (menyempurnakan kepribadian setiap warga Negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk Negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia; dan menanamkan sifat patriotisme.

Struktur dan jenis Pendidikan

Secara umum system pendidikan di korea Selatan terdiri dari empat jenjang yaitu : Sekolah dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, SLTA dan pendidikan tinggi. Keempat jenjang pendidikan ini sejalan dengan “grade” 1-6 (SD), grade 7-9 (SLTP), 10-12 (SLTA), dan grade 13-16 (pendidikan tinggi/program S1) serta program pasca sarjana (S2/S3). Berikut visualisasi grade pendidikan dimaksud.

Sekolah dasar merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 dan 11 tahun, dengan jumlah APM SD mencapai 99,8% putus sekolah SD 0%.

SMP merupakan kelanjutan SD bagi anak usia 12-14 tahun, selama 3 tahun pendidikan, yang kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade 10-11 dan 12, dengan dua pilihan yaitu: umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan dan teknik. Selain itu ada sekolah komperhensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik (junior college) atau universitas (senior college) yang kemudian dapat melanjutkan ke program pasca sarjana (graduate school) gelar master/dokter.

Manajemen Pendidikan Korea Selatan

Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada menteri pendidikan. Di daerah terdapat dewan pendidikan (board of education). Pada setiap propinsi dan daerah khusus (Seoul dan Busan), masing-masing dewan pendidikan terdiri dari tujuh orang anggota yang dipilih oleh daerah otonom, dari lima orang dipilih dan dua orang lainnya merupakan jabatan ‘*ex officio*’ yang dipegang oleh walikota daerah khusus atau gubernur propinsi dan super intendent, Dewan pendidikan diketuai oleh walikota atau gubernur.

Anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran Negara, dengan total anggaran 18,9% dari Anggaran Negara. Pada

tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukan untuk ini, adapun sumber biaya pendidikan, bersumber dari, GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan.

Guru/Personalia. Terdapat dua jenis pendidikan guru, yaitu tingkat academic (grade 13-14) untuk guru SD, dan pendidikan guru empat tahun untuk guru sekolah menengah. Dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah untuk pendidikan guru negeri. Kemudian guru mendapat sertifikat yaitu : sertifikat guru pra sekolah, guru SD, dan guru sekolah menengah, sertifikat ini diberikan oleh kepala sekolah dengan kategori guru magang, guru biasa dua (yang telah diselesaikan onjob training) dan lesensi bagi guru magang dikeluarkan bagi mereka yang telah lulus ujian kualifikasi lulusan program empat tahun dalam bidang engineering, perikanan, perdagangan, dan pertanian. Sedangkan untuk menjadi dosen junior college, harus berkualifikasi master (S2) dengan pengalaman dua tahun dan untuk menjadi dosen di senior college harus berkualifikasi dokter (S3).

Kurikulum. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea, dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi, adapun yang dikerjakan oleh guru, meliputi lima langkah yaitu (1) perencanaan pengajaran, (2) Diagnosis murid (3) membimbing siswa belajar dengan berbagai program, (4) test dan menilai hasil belajar. Di sekolah tingkat menengah tidak diadakan saringan masuk, hal ini dikarenakan adanya kebijakan "equal accessibility" ke sekolah menengah di daerahnya.

Isu-isu Pendidikan Korea Selatan

Diantaranya adalah: 1) meningkatkan investasi pendidikan, 2) memperkecil jurang pemisah antara penduduk kota dan desa, 3) memberikan perhatian besar terhadap pendidikan social dan moral.

Sistem Pendidikan di Jepang

Latar Belakang

Jepang terdiri dari 4000 pulau besar dan kecil, yang terbentang sepanjang timur laut pantai benua Asia. Luas Jepang 378.000 km² dengan penduduk berjumlah 126.182.077 jiwa. Dengan penduduk 60 th ke atas sebanyak 16.5 % (world alamanac 2000), sedangkan usia di bawah 14 tahun sebanyak 23,6% dengan kaum muda lebih banyak hidup dari perkotaan, sedangkan orangtua lebih banyak di pedesaan.

Ditinjau dari etnis Jepang termasuk kependudukan yang homogen yaitu 99.4 % orang Jepang, dengan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.

Secara administrasi Jepang dibagi dalam 47 Ken/district yang selanjutnya terbagi lagi dalam 3256 shi/Son/kota puaja. Sesuai UU otonomi daerah Jepang tahun 1947, anggota DPR, kepala Ken, kepala kota praja dipilih langsung oleh rakyat. Dimana setiap district terdapat dewan sekolah atau kepala kota praja setempat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan Jepang tercantum dalam undang-undang pokok pendidikan tahun 1947 ayat 1, menyatakan bahwa, pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian setiap individu baik fisik, maupun psikis, yang cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, menghargai pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri Negara dan masyarakat yang damai.

Titik berta pendidikan Jepang adalah pengembangan kemampuan dasar dalam diri generasi muda, dengan asumsi bahwa generasi muda harus siap menyesuaikan diri dengan kemajuan IPTEK yang global.

Jenis Pendidikan

Sebelum perang dunia II, system pendidikan Jepang memiliki banyak jalur (Multi tract), namun setelah tahun 1980-an pemerintah Jepang melakukan reformasi di bidang pendidikan

Taman kanak-kanak menerima anak berusia 3-5 tahun, sedangkan pendidikan dasar (SD) menerima siswa yang berusia enam tahun yang sebagian besar (97 %) berada di SDN, dengan jumlah mata pelajaran bervariasi yaitu : 850 jam pelajaran/th untuk grade 1 sampai 1015 dan bagi grade 4-6, Sedangkan kenaikan antara grade berikutnya dilaksanakan secara otomatis.

Sedangkan untuk pendidikan menengah pertama berlangsung selama tiga tahun dengan jumlah jam pelajaran 1015/tahun. Setelah selama 3 tahun melalui ujian masuk, dengan angka partisipasi murni 94 %, namun 18 % diantaranya masuk SLTA swasta , dan 10 % diantaranya mengambil jurusan umum, selebihnya masuk sekolah kejuruan teknik dan pertanian.

Pendidikan tinggi (universitas/Daigaku) atau Tin kidaigaku (junior college), melalui ujian masuk yang meliputi test achivement, interview, test essai, dll, lama pendidikan di Universitas (daigaku) berlangsung selama 4 (empat) tahun sedangkan di Tan kigaikaku 2-3 tahun, serta pendidikan khusus teknik (Peoto Senmogakku) yang berlangsung selama 5 tahun setelah tamat SLTA.

Kemudian di Jepang terdapat pendidikan non formal, yang dikenal dengan pendidikan social. Adapun lingkup pendidikan non formal meliputi : teknik pertanian, perikanan, nelayan dan buruh kehutanan. Selain itu juga tersedia pula program-program pendidikan Radio dan televisi untuk pendidikan umum dan keterampilan.

Manajemen Pendidikan

Pada level nasional tanggung jawab pendidikan ada pada kementerian pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Kementerian memberikan pedoman untuk menyusun kurikulum, mata pelajaran serta persyaratan kredit mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi. Kementerian juga bertanggung jawab terhadap pengembangan buku teks untuk sekolah dasar dan menengah.

Kemudian distrik terdapat dewan pendidikan yang bertanggung jawab terhadap supervise atas masalah-masalah personalia pada lembaga pendidikan pemerintah, memberikan inservice training asset cultural, dan memberikan nasihat kepada lembaga-lembaga pendidikan.

Di masing-masing kota praja memiliki tiga sampai lima orang dewan pendidikan dengan fungsi utamanya memberikan dan mengurus institusi pendidikan di kota praja.

Anggaran Pendidikan. Sistem administrasi keuangan pendidikan Jepang disediakan bersama-sama antara pemerintah pusat, distrik, maupun kota praja. Dimana diambil dari pajak dan dari sumber-sumber lain. Adapun anggaran pendidikan Jepang pada tahun 1980 (16,7 triliun) yen/97.000 juta dolar AS (19,7%) dari total anggaran belanja pemerintah Jepang, dengan alokasi : 54,55 untuk wajib belajar, 17,9% untuk pendidikan menengah dan 21,1% untuk pendidikan tinggi, sedangkan 1992-1994 anggaran pendidikan Jepang sebesar 3,6% dari GNP nya (10,4 dan 19,9%) dari anggaran pemerintah.

Guru/Personalia. Untuk menjadi guru SD dan sekolah menengah, guru harus dididik/dilatih di universitas, pasca sarjana dan junior college yang dipilih oleh kementerian pendidikan. Kemudian guru memperoleh sertifikat mengajar dari dewan pendidikan distrik yang berlaku di semua distrik. Sertifikat untuk guru

SD, memberikan kewenangan untuk mengajar semua mata ajaran, sementara untuk guru menengah hanya pada mata ajaran tertentu saja, ke semua ini diperoleh setelah lulus rekrutmen yang dilakukan Dewan Pendidikan Distrik.

Kurikulum. Kurikulum sekolah ditentukan oleh menteri pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh dewan pendidikan distrik dan kota praja. Kurikulum awal tahun 1980 memuat mata pelajaran untuk SD terdiri dari, bahasa Jepang sebagai pengantar, ilmu social, berhitung, ilmu pengetahuan umum, musik/seni dan kerajinan, pendidikan jasmani dan kesehatan (grade 4 dan 6), disamping itu pendidikan moral wajib belajar 9 tahun, khusus perbaikan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Evaluasi. Pada semua tingkat system pendidikan di Jepang harus menempuh berbagai ujian, yang merupakan syarat untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah/sertifikat. Bagi siswa yang kehadirannya kurang dari 5% tahun belajar, dan hasil ujian jelek, maka diwajibkan untuk mengulang pada level yang sama.

Isu-isu Pendidikan Jepang

Kekurangan tenaga kerja yang terampil merupakan isu utama, untuk itu pendidikan Jepang memerlukan guru guna pembelajaran kreatifitas dan pengembangan karakter setiap anak.

Pendidikan Jepang saat ini mengalami kelemahan dalam hal ilmu dan keterampilan serta tidak punya sikap hidup yang baik, dengan indikator-indikator lain seperti : kurang respek terhadap orang tua, meningkatnya individualisme, dan keras kepala.

Pengembangan Kurikulum

Di Jepang kurikulum disusun oleh sebuah komite khusus dibawah kontrol Kementerian Pendidikan (MEXT). Komisi Kurikulum terdiri dari wakil dari *Teacher Union*, praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil MEXT. Komisi ini bertugas mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam *Fundamental Education Law (Kyouiku kihonhou)*, lalu menyesuaikannya dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Namun, karena unsur politik sangat kental mewarnai wakil-wakil yang duduk dalam komisi ini maka tak jarang terjadi perdebatan panjang terutama antara wakil teacher union dan wakil kementerian dalam penyusunan draft kurikulum.

Pembaharuan kurikulum di Jepang berlangsung setiap 10 tahun sekali, dan kurikulum terbaru yang diterbitkan di tahun 1998 adalah pembaharuan ketujuh sejak kurikulum yang diterapkan pada Perang Dunia II.

Kurikulum 1998 membawa angin baru dalam dunia pendidikan Jepang. Kurikulum ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya berdasarkan konsep yang dibawanya yaitu pendidikan yang berorientasi kepada pengembangan beragam personality siswa, bukan seperti sebelumnya yaitu common education, atau pendidikan yang sama untuk semua siswa.

Guru-guru di Jepang sejak perang percaya bahwa pendidikan harus bersifat massal dan sama, bahkan pendidikan yang menjurus kepada kekhasan tertentu atau menerapkan pola/metode yang lain daripada yang lain dianggap salah. Guru-guru Jepang senantiasa menjaga image bahwa semua siswa harus memiliki prestasi yang sama,

kedisiplinan yang sama dengan sistem pendidikan yang serupa. Namun adanya kurikulum baru menyadarkan mereka bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda dengan lainnya, dan inilah yang harus dibina.

Kurikulum yang baru bersifat fleksibel dan memungkinkan sekolah untuk meramu kurikulum sendiri berdasarkan kondisi daerah, sekolah dan siswa yang mendaftar. Sebagai contoh, di SMP, selain mata pelajaran wajib, siswa juga ditawarkan dengan mapel pilihan.

Dengan adanya kurikulum baru ini, training besar-besaran dilakukan untuk mengubah pola pikir guru-guru Jepang. MEXT juga merevisi beberapa buku pelajaran, dan secara hampir bersamaan mengusulkan pemberlakuan 5 hari sekolah dan adanya jam khusus untuk pengembangan jiwa sosial siswa melalui integrated course atau sougoteki jikan.

Kurikulum di level sekolah disusun dengan kontrol penuh dari The Board of Education di Tingkat Prefectur dan municipal (distrik). Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Central Council for Education (chuuou shingi kyouiku kai) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang.

Beberapa hal berikut harus diperhatikan ketika sekolah menyusun kurikulumnya: (1) Mengacu kepada standar kurikulum nasional, (2) Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa, (3) Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, (4) Memperhatikan step perkembangan siswa, (4) Memperhatikan karakteristik course pendidikan/jurusan pada level SMA.

Kurikulum sekolah di Jepang meliputi tiga aspek yaitu, **subjects** (*kamoku*), **moral education** (*doutoukukyouiku*) dan **extra-curricular**. Subjects atau mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib di SD, dan mata pelajaran wajib dan pilihan di SMP dan SMA. Pendidikan moral bukan berupa mata pelajaran khusus seperti di Indonesia, tetapi berupa guidance dan konseling selama 1 jam pelajaran dalam seminggu yang dilakukan oleh guru wali kelas. Tidak ada penilaian atau nilai raport untuk mapel ini. Extra kurikuler berupa kegiatan olah raga, seni, kegiatan OSIS, atau event sekolah.

Berikut ini adalah jumlah jam pelajaran di SD selama setahun (data tahun 199

Subject	Yearly School hours per Grade (hours)					
	1	2	3	4	5	6
Japanese	306(272)	315(280)	280(235)	280(235)	210(180)	210(175)
Social Studies	-	-	105(70)	105(85)	105(90)	105(100)
Arithmetic	136(114)	175(155)	175(150)	175(150)	175(150)	175(150)
Science	-	-	105(70)	105(90)	105(95)	105(95)
Life Environment Studies	102(102)	102(102)	-	-	-	-
Music	68(6)	70(70)	70(60)	70(60)	70(50)	70(50)
Drawing and Handicrafts	68(6)	70(70)	70(60)	70(50)	70(50)	70(50)
Homemaking	-	-	-	-	70(60)	70(55)
Physic Education	102(90)	105(90)	105(90)	105(90)	105(90)	105(90)
Moral Education	34(34)	35(35)	35(35)	35(35)	35(35)	35(35)
Extra Curricular	34(34)	35(35)	35(35)	70(35)	70(35)	70(35)
Integrated Study			105	105	110	110
Total	850(782)	910(840)	980(910)	1015(945)	1015(945)	1015(945)

Dan anak-anak SMP mulai belajar bahasa asing seperti contoh di bawah ini,

Subject	Yearly School Hours per Grade (hours)		
	1	2	3
Japanese	175(140)	175(105)	175(105)
Social Studies	140(105)	140(105)	70-105(85)
Mathematics	105(105)	140(105)	140(105)
Science	105(105)	105(105)	105-140(85)
Music	70(40)	35-70(35)	35(35)
Arts	70(45)	35-70(35)	35(35)
Health and Physic Education	105(90)	105(90)	105-140(90)
Industrial Arts and Home economic	70(70)	70(70)	70-105 (35)
Foreign Language	105-140(105)	105-140(105)	105-140(105)
Elective Subjects	0-35 (0-30)	0-105(50-85)	35-275(105-165)
Moral Education	35(35)	35(35)	35(35)
Extra Curricular	35-70(35)	35-70(35)	35-70(35)
Integrated Study	70-100	70-105	70-130
Total	1050(980)	1050(980)	1050(980)

Angka di dalam kurung menunjukkan jumlah jam pelajaran per tahun yang berlaku sejak tahun 2002 hingga saat ini. Sebentar lagi akan ada perubahan jumlah jam pelajaran, yaitu penambahan pada jam pelajaran bahasa Inggris untuk SD kelas 5 dan 6, dan pengurangan jam integrated study. Integrated study juga bukan pelajaran khusus yang akan diujikan kepada siswa, tetapi dalam laporan hasil belajar ada penjelasan tentang apa saja kegiatan yang telah dilakukan/diajarkan kepada siswa selama jam-jam tersebut. Beberapa SMP dan SMA menawarkan pelajaran pilihan kepada siswa, sesuai dengan minat mereka, tetapi pelajaran pilihan ini tidak diwajibkan kepada sekolah untuk menyelenggarakannya.

Sistem ujian/ulangan sekolah² di Jepang menarik untuk kita cermati. Pendidikan dasar (shougakkou) tidak mengenal ujian kenaikan

kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas satu secara otomatis akan naik ke kelas dua, demikian seterusnya. Ujian akhir pun tidak ada, karena SD dan SMP masih termasuk kelompok compulsory education, sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP. Lalu bagaimana menilai mutu pendidikan ? Tentu saja guru tetap melakukan ulangan sekali2 untuk mengecek daya tangkap siswa. Dan penilaian ulangan pun tidak dengan angka tetapi dengan huruf : A, B, C, kecuali untuk matematika. Dari kelas 4 hingga kelas 6 juga dilakukan test IQ untuk melihat kemampuan dasar siswa. Data ini dipakai bukan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan hasil test IQ-nya, tetapi untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kemampuan di atas normal atau di bawah normal. Perlu diketahui, siswa2 di Jepang tidak dikelompokkan berdasarkan kepandaian, tetapi semua anak dianggap `bisa` mengikuti pelajaran, sehingga kelas berisi siswa dengan beragam kemampuan akademik.

Compulsory Education di Jepang dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada semua anak untuk mengenyam pendidikan selama 9 tahun (SD dan SMP) dengan menggratiskan tuition fee, dan mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak (ditetapkan dalam Fundamental Law of Education). Untuk memudahkan akses, maka di setiap distrik didirikan SD dan SMP walaupun daerah kampung dan siswanya minim (per kelas 10-11 siswa). Orang tua pun tidak boleh menyekolahkan anak ke distrik yang lain, jadi selama masa compulsory education, anak bersekolah di distrik masing2. Tentu saja mutu sekolah negeri di semua distrik sama, dalam arti fasilitas sekolah, bangunan sekolah, tenaga pengajar dengan persyaratan yang sama (guru harus

memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh Educational Board setiap prefecture). Oleh karena itu mutu siswa SD dan SMP di Jepang yang bersekolah di sekolah negeri dapat dikatakan `sama`, sebab Ministry of Education menkondisikan equality di semua sekolah. Saat ini tengah digalakkan program reformasi yang memberi kesempatan kepada sekolah untuk berkreasi mengembangkan proses pendidikannya, tetapi tetap saja dalam pantauan MOE.

Di tingkat SMP dan SMA, sama seperti di Indonesia, ada dua kali ulangan, mid test dan final test, tetapi tidak bersifat wajib atau pun nasional. Di beberapa prefecture yang melaksanakan ujian, final test dilaksanakan serentak selama tiga hari, dengan materi ujian yang dibuat oleh sekolah berdasarkan standar dari Educational Board di setiap prefektur. Penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tapi akumulasi dari nilai test sehari2, ekstra kurikuler, mid test dan final test. Dengan sistem seperti ini, tentu saja hampir 100% siswa naik kelas atau dapat lulus.

Selanjutnya siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar, artinya soal ujian dibuat oleh Educational Board di setiap prefektur. Di Aichi prefecture, SMA-SMA dikelompokkan dengan pengelompokan A, B. Pengelompokan tersebut dibuat dalam proses memilih SMA. Setiap siswa dapat memilih satu sekolah di kelompok A dan satu sekolah di kelompok B. Jika si siswa lulus dalam kelompok A, maka secara otomatis dia gugur dari kelompok B. Dalam memilih SMA, siswa berkonsultasi dengan guru, orang tua atau disediakan lembaga khusus di Educational Board yang bertugas melayani konsultasi dalam memilih sekolah. Ujian masuk pun hampir serentak di seluruh jepang

dengan bidang studi yang sama yaitu, Bahasa Jepang, English, Math, Social Studies, dan Science. Di level ini siswa dapat memilih sekolah di distrik lain.

Seperti dipaparkan di atas, siswa SMA tidak mengikuti ujian kelulusan secara nasional, tetapi ada beberapa prefecture yang melaksanakan ujian. Penilaian kelulusan siswa berbeda di setiap prefecture. Mengingat angka Drop out siswa SMA meningkat di tahun 1990-an, maka beberapa sekolah tidak mengadakan ujian akhir, jadi kelulusan hanya berdasarkan hasil ujian harian.

Untuk masuk universitas, siswa lulusan SMA diharuskan mengikuti ujian masuk universitas yang berskala nasional. Ini yang dianggap `neraka` oleh sebagian besar siswa SMA. Sebagian dari mereka memilih untuk belajar di juku (les privat, seperti di Indonesia) untuk dapat lulus ujian masuk universitas. Ujian masuk PT dilakukan dua tahap. Pertama secara nasional- soal ujian disusun oleh Ministry of education, terdiri dari lima subject, sama seperti ujian masuk SMA-, selanjutnya siswa harus mengikuti ujian masuk yang dilakukan masing2 universitas, tepatnya ujian masuk di setiap fakultas. Skor kelulusan adalah akumulasi ujian masuk nasional dan ujian di setiap PT. Seperti halnya di Indonesia, skor hasil UMPTN tidak diumumkan, tetapi jawaban ujian diberitakan via koran, TV atau internet, sehingga siswa dapat mengira2 sendiri berapa total score yg didapat. Siswa yang memilih Universitas dg skor tinggi, tapi ternyata skornya tidak memadai, dapat mengacu ke pilihan universitas ke-2. Namun jika skornya tidak mencukupi, maka siswa tidak dapat masuk Universitas. Selanjutnya dia dapat mengikuti ujian masuk PT swasta atau menjalani masa *ronin*

(menyiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk di tahun berikutnya) di preparatory school (*yobikou*)

Penilaian mutu pendidikan di Jepang, dengan kata lain dilakukan dengan menstandarkan ujian masuk SMA dan PT, tentu saja sistem ini bisa berjalan karena pemerintah di Jepang pun berusaha maksimal untuk menyamakan kondisi public education-nya, dalam arti menyediakan infra struktur yang sama untuk setiap jenjang pendidikan di daerah.

Komparatif Statistik-statistik Pendidikan

Berikut ini disajikan beberapa data statistic yang ada kaitannya dengan pendidikan, Cina-Korea Selatan, Jepang dan Indonesia, Amerika sebagai pembandingan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perbandingan Masa Wajib Belajar dan Usia Masuk Sekolah

No	Negara	Wajib Belajar		Umur masuk
		Batas umur	Lamanya	Pra sekolah
1	Republik Rakyat Cina	7-15 th	9 th	3 th
2	Republik Rakyat Korea Selatan	6-15 th	9 th	5 th
3	Jepang	6-15 th	9 th	3 th
4	Indonesia	7-15 th	9 th	5 th
5	Amerika Serikat	6-16 th	10 th	3 th

Sumber : Unesco Syatistical Yearbook 1999.

Tabel 2

Perbandingan Persentase Penduduk yang Mampu Tulis Baca (Literasi)

No	Negara	%	Th
1	Republik Rakyat Cina	82	1996
2	Republik Rakyat Korea Selatan	98	1994
3	Jepang	100	1997
4	Indonesia	84	1997
5	Amerika Serikat	97	1994

Sumber: The Woalumanac and book of facts 2000

Tabel 3

Perbandingan APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah
antara Laki-laki dan Wanita

Tahun	Negara		APK		APN	
			SD	SLTP/A	SD	SLTP/A
1995	RRC	P	102	98	94	90
		W	101	97	95	90
1995	Korea Selatan	P	102	98	94	90
		W	101	97	95	90
1995	Jepang	P	102	98	94	90
		W	101	97	95	90
1998	Indonesia	P	110,83	70,43	98,28	45
		W				
1995	Amerika Serikat	P	102	98	94	90
		W	101	97	95	90

Tabel 4
Perbandingan APK dan APM
Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Negara	Tahun	APK		APN	
			SD	SLTP/A	SD	SLTP/A
1	RRC	1995	118	66	98	-
2	KOREA-SEL	1996	94	92	102	97
3	JEPANG	1994	103	100	103	99
4	INDONESIA	1994	113	95	48	42
5	AS	1995	102	97	95	90

Sumber: UNESCO Year book 1999, (gabungan antara pria dan wanita)

Tabel 5
Presentase Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan
Dihitung dari GNP dari Total Anggaran Pemerintah

No	Negara	% GNP		% GNP	
		1990	1995	1990	1999
1	RRC	2,3	2,3	12,8	16,5
2	KORSEL	3,5	3,7	15,5	17,5
3	JEPANG	3,6	3,6	10,4	19,9
4	INDONESIA	1,1	1,4	3,22	3,4
5	AS	5,2	5,4	12,3	14,1

Sumber: UNESCO Year book 1999

Pembahasan

Dari kajian singkat tentang studi perbandingan system pendidikan dikawasan Asia, yang meliputi : RRC, Korea Selatan dan Jepang, sebagaimana telah penulis uraikan pada bab II, selanjutnya penulis dapat memnerikan beberapa refleksi sebagai bahan perbandingan dengan system pendidikan

Indonesia yang saat ini sedang mengalami perubahan drastis dalam segi manajemennya.

Penulis tertarik untuk membahas ketiga Negara ini, karena penulis beranggapan bahwa ketiga Negara ini merupakan Negara “**super power**” dikawasan Asia, yang sebagian besar Negara-negaranya termasuk kategori negara berkembang. Akan tetapi khusus Negara Jepang merupakan salah satu Negara industri otomotif terbesar di dunia, begitu pula dengan Korea Selatan dan Cina yang akhir-akhir ini mulai bangkit dan menunjukkan kemampuannya untuk berkompetitif dalam pasaran otomotif dan industri elektronik dunia umumnya dikawasan Asia dan pasaran Indonesia khususnya.

Untuk itu, ternyata secara umum system pendidikan di ketiga Negara ini tidaklah jauh berbeda inipun tidak jauh berbeda dengan system pendidikan di Indonesia masa lalu, yang bersifat sentralistik. Namun demikian, perbedaan terlihat menonjol, walaupun di ketiga Negara ini semua panduan pendidikan dikeluarkan oleh komite pendidikan, akan tetapi dalam operasionalnya diserahkan kepada Dewan Pendidikan Daerah, baik daerah distrik ataupun kota praja (Jepang) dan Komite Pendidikan Negara/SEDC (Cina) serta Dewan Pendidikan (Korea Selatan khususnya untuk kota Seoul dan Busan yang merupakan propinsi khusus). Dimana dewan pendidikan ini diketahui oleh Gubernur/Walikota dengan anggotanya sebanyak 5-6 orang, sehingga berjumlah 7 (tujuh) orang.

Dewan Pendidikan inilah yang bertanggung jawab terhadap operasional pendidikan, sehingga dewan/komite pendidikan diberikan kewenangan yang luas untuk menjabarkan berbagai macam kebijakan sesuai panduan yang telah dikeluarkan oleh kementerian pendidikan. Kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia, yang hingga saat ini belum ada kegiatan “Dewan Pendidikan Nasional”, walaupun ada namun fungsinya tidak jelas dan tidak tepat serta tidak memiliki “otoritas” dalam hal perumusan kebijakan, sifatnya hanya baru sebagai sebatas sebagai “pengkaji” masalah-masalah pendidikan, tetapi belum sampai kepada perumus kebijakan, sehingga akibatnya kondisi sentralisasi

pendidikan Indonesia betul-betul bersifat permanent dan kaku, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bila dibandingkan dengan ketiganegara ini. Terutama dalam hal teknologi, Indonesia jauh tertinggal.

Hal ini cukup beralasan dan dimungkinkan bila ditinjau dari anggaran pendidikan Negara, dimana ketiga Negara ini sudah sejak lama sudah menganggarkan anggaran pendidikan yang cukup signifikan dengan hasil yang didapat yaitu masing-masing : RRC 12,8, Korea Selatan 17,5, Jepang 19,7% dari anggaran belanja Negara, sedangkan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, anggaran pendidikan bila dirata-rata baru berkutat-katit antara 2-4,6% dari total anggaran Negara. Kondisi ini jauh berbeda dengan anggaran ketiga Negara ini, jadi teori tidak dapat dipungkiri bahwa “semakin tinggi anggaran pendidikan semakin maju ekonomi di suatu Negara” (Ferggeson, 1999).

Kondisi lain yang dapat dipetik dalam hal guru, dimana ketiga Negara ini untuk menjadi guru SD saja harus berlatar “Yunior College” di Indonesia, terutama lima tahunan kebelakang guru SD kita hanya bertingkat SLTA, yang kini baru beranjak ke PGSD II (dua tahun diatas SLTA/Yunior College). Jadi dari segi latar pendidikan guru SD saja kita sudah tertinggal kurang lebih 20-50 th dibandingkan dengan ketiga Negara ini. Belum lagi masalah karier, dimana di ketiga Negara ini menerapkan system senrifikasi terhadap guru, sedangkan gurusekolah menengah ketiga Negara ini mensyaratkan harus berlatar belakang S2/S3 dengan kajian khusus atau bidang study, beda halnya di Indonesia yang terkadang satu guru bisa mengajarapa saja, bahkan tidak aneh bila guru agama mengajar matematika dll, serta sebaliknya.

Mengingat guru merupakan ”titik sentral” dalam maju mundurnya kondisi sekolah, untuk itu sudah selayaknyalah guru harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menjamin kesejahteraan merek, sehingga para guru dapat merasa bangga dengan tugasnya. Hal ini cukup beralasan, karena menurut Ferggosun, (1999) bahwa “.....Semakin tinggi gaji guru semakin berkualitas hasil pendidikan”. Untuk membuat para guru sejahtera, sangat erat kaitannya dengan anggaran pendidikan, begitupun untuk mendapatkan

pendidikan yang berkualitas sangat erat hubungannya dengan ketersediaan anggaran pendidikan kesemua masalah ini dimungkinkan di capai, apabila semua pihak memiliki kometmen yang tinggi terhadap “industri pendidikan”.

Kesimpulan

Dari hasil kajian dan pembahasan tentang studi komparatif system pendidikan RRC-Korea Selatan-dan Jepang, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Sistem manajemen dari ketiga Negara ini bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi, sifat kesentralistiknya hanya terbatas kepada penyusunan panduan dan pedoman semata, sedangkan operasionalnya secara penuh di serahkan kepada komite/Dewan sekolah secara mandiri untuk mengkaji proses pendidikan secara keseluruhan. Kondisi ini sangat berbeda dengan system pendidikan di Indonesia masa lalu dan masa kini yang mana masalah sepenuhnya sentralistik, tanpa memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan proses pendidikan, sedangkan saat ini di Indonesia memasuki era “desentralisasi” ini pun proses pengelolaan pendidikan, khususnya aspek anggaran “Daerah” masih belum manaruh perhatian penuh terhadap pendidikan.

Kurikulum, di ketiga Negara ini kurikulum dirangkai oleh kementerian pendidikan dan Dewan Sekolah yang seterusnya, sekolah diberi keleluasaan untuk menambah kurikulum local sesuai peminatan siswa dan kondisi wilayah masing-masing, dengan pilihan kurikulum local yang diarahkan kepada masalah : Pertanian, perikanan, dan Teknologi, yang mampu membawa siswa untuk memiliki kretifitas khusus dalam kehidupannya. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang rata-rata memasukkan kurikulum local yang “ tidak” langsung berhubungan dengan pemenuhan harkat hidup siswa, seperti kurikulum local hanya terbatas pada bahasa daerah/bahasa asing, seni dan lain-lain, yang tidak atas dasar keinginan siswa dan kondisi daerah setempat.

Anggaran Pendidikan. Diketiga Negara ini rata-rata sejak tahun 40-an, telah menganggarkan pendidikan secara konstan cukup besar yaitu rata-rata 19,7% dari total anggaran Negara. Hal ini sangat di atas Indonesia, yang hingga saat ini hanya “berkutut” diantara rata-rata 2-3,6% dari total anggaran Negara. Guru. Mengingat guru memegang peran “sentral” dalam kelangsungan pendidikan maka ketiga Negara, telah sejak lama mensyaratkan bagi guru SD adalah berpendidikan junior college hingga senior sedangkan untuk sekolah menengah harus berlatar belakang S2/S3, dengan system dengan system sertifikatsi, dan hanya untuk satu bidang studi bagi guru sekolah menengah dan boleh semua mata ajaran untuk guru SD. Di Indonesia berbeda dimana guru SD, sekolah menengah bersifat menyeluruh artinya boleh mengajar di Atas dasar kajian dan simpulan ini penulis merekomendasikan sebagai berikut: mengingat saat ini sudah era desentralisasi/otonomi daerah, sehingga peranan daerah cukup luas dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, untuk itu kiranya daerah agar lebih memperhatikan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD, tidak hanya menunggu dan berharap dari APBN semata-mata. Hal ini dapat dijadikan contoh seperti yang dilakukan oleh ketinggian Negara ini, dimana anggaran pendidikan dipikul bersama antara daerah dan pemerintah pusat.

Untuk memberikan peluang masa depan pada siswa, kiranya system kurikulum hendaknya lebih fleksibel dan daerahpun agar memasukkan kurikulum local yang bersifat “kreatifitas” sesuai kondisi daerah masing-masing : seperti kurikulum local pertanian, perikanan, perkebunan.teknologi dan lain-lain, tidak hanya sebatas kurikulum seperti bahasa daerah atau bahasa asing yang selama ini banyak dimunculkan sehingga, mtidak berpengaruh terhadap lapangan kerja dan tidak meberikan jaminan untuk kehidupan.pekerjaan siswa setelah tamat sekolah.

Hal ini, penulis munculkan, karena ternyata diketiga Negara ini cukup berhasil dengan kurikulum local yang mereka pilih berupa pertanian, perikanan, dan teknologi industri dan lain-lain, ini terbukti dengan banyaknya

kerajinan industri yang bersifat home industri di ketiga Negara ini, sehingga pada gilirannya akan berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi Negara dan kesejahteraan masyarakatnya semakin bertambah.

Daftar Pustaka

Agustiar Syah Nur, (2001), *Perbandingan system pendidikan*, Bandung : Lubuk Agung.

H.A.R Tilaar, (1994), *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung : Rosdakarya.

Ary, G. (1996). *Administrasi Sekolah:administrasi pendidikan Mikro*. Jakarta: rineka Cipta

Atmodiwirto, Soebagio, 2000 *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Ardadizya jaya.

Engkoswara. (1987). *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta :Dirjen Dikti Depdikbud.

Nanag Fattah. (1996). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT remaja Persada Karya.

Ngalim Purwanto. (1993). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Badung: CV Remaja Karya.

Supriadi, Iman (1988), *dasar-Dasar Administrasi Pendidikan* Jakarta, P2LPTK

Undap, Andy PP (1988). *Pola Kepemimpinan dan profesionalisasi Tenaga Kependidikan*. (Disertasi) Bandung; Program Pascasarjana UPI.